

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dapat berpengaruh pesat terhadap proses ataupun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat termasuk instansi swasta maupun pemerintahan. Pada dewasa ini sudah banyak penduduk dunia yang dapat menggunakan ataupun menikmati dari hasil perkembangan Teknologi Informasi yang dijadikan sebagai pendukung dalam proses bisnis baik secara internal maupun eksternal. Pelayanan yang cepat, akurat dan efisien dapat membantu organisasi dalam melakukan proses bisnis yang sedang berjalan. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat akan lebih meningkat terhadap suatu instansi.

Pada saat ini pemerintah Indonesia mencangkankan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini tertuang pada Peraturan Menteri PAN & RB RI No. 5 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem pemerintahan berbasis elektronik diselenggarakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Dimana prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya.

Selain itu penerapan Tata Kelola juga diharapkan dapat mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ E-government) yang sedang dimatangkan persiapannya, baik aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya, oleh sejumlah instansi terkait yang antara lain melibatkan Kantor

Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN & RB, Kementerian Kominfo, dan Lembaga Administrasi Negara. (Peraturan Menteri PAN & RB RI No.5 Tahun 2018).

Kementerian Agama Provinsi Gorontalo merupakan Instansi yang sudah Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satunya bidang kepegawaian telah menerapkan aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai), SIMPEG ini dikelola oleh Kementerian Agama Pusat dan Kementerian Agama Daerah yang saling terintegrasi, dimana aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses manajemen data kepegawaian baik dari Pendataan pegawai, BKD, Perencanaan dan informasi kepegawaian, penggajian, penilaian angka kredit, mutasi pegawai, dan sistem pelaporan.

Tetapi dalam pelaksanaannya, proses Evaluasi SPBE yang ada di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo masih belum maksimal, untuk proses peningkatan Teknologi yang digunakan perlu diadakannya Evaluasi terlebih dahulu terhadap Layanan dan juga Tata Kelola, sehingga dalam perencanaan instansi untuk pengembangan Sistem yang diterapkan bisa melihat kinerja Sistem dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian perlu dilakukan evaluasi terhadap Teknologi Informasi (TI) yang telah diterapkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan proses penilaian terhadap Teknologi Informasi yang diterapkan oleh suatu instansi pusat dan pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE yang

diterapkan. Adapun 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator yang akan disesuaikan dengan kebijakan layanan dan juga tata kelola dalam penilaian SPBE Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

Berkaitan dengan evaluasi SPBE seperti Penelitian yang dilakukan oleh Bouty dkk (2019) dimana hasil evaluasi dengan predikat BAIK dan mendapatkan nilai indeks 2,88 evaluasi tersebut menggunakan kerangka SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem pemeritahan berbasis elektronik oleh pemerintah kota gorontalo saat ini telah berjalan dengan baik sesuai dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam Penelitian ini dengan judul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pegawai menggunakan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) studi kasus: Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat melihat nilai Tingkat Kematangan (*Maturity Level*) dan memberikan rekomendasi perbaikan dari segi aspek SPBE yang bisa ditingkatkan untuk SIMPEG Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana evaluasi penerapan SIMPEG menggunakan Kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada tingkat kematangan (*maturity level*) SIMPEG Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
2. Kerangka kerja yang digunakan adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Menggunakan 14 Indikator SPBE dan 2 Indikator tambahan dari 3 Domain 7 Aspek 35 Indikator SPBE yang disesuaikan dengan SIMPEG Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui evaluasi penerapan SIMPEG menggunakan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang evaluasi penerapan TI menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
  - b. Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya evaluasi penerapan TI sehingga memperoleh manfaat ekonomis dalam proses bisnisnya.
  - c. Untuk dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang evaluasi berdasarkan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui penerapan SIMPEG berdasarkan kerangka SPBE pada Kementerian Agama Provinsi Gorontalo apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui rekomendasi atau saran untuk perencanaan dan pengembangan atau perbaikan dari hasil evaluasi SIMPEG berdasarkan kerangka SPBE pada Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
- c. Tim Pengarah SPBE instansi pemerintah lebih mudah memajemen pengembangan SIMPEG secara berkesinambungan.